

# **Pengaruh Kompensasi Manajemen terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan dengan Moderasi Kepemilikan Keluarga di Indonesia**

*Full paper*

**Gandy Wahyu Maulana Zulma**  
Universitas Indonesia  
[maulanagandi25@gmail.com](mailto:maulanagandi25@gmail.com)

**Abstract:** *The aim of this study is to investigate the effect of management compensation to tax avoidance, and also examines the role of family firm's ownership could moderate the relation between management compensation and tax avoidance. The population in this study is manufacture industries that listed on Indonesia Stock Exchange (IDX) from 2011 to 2014, with purposive sampling method, the final total sample observation is 268 firm-years. The result shows the negative effect between management compensation and tax avoidance. In addition, family firm's ownership could reduce the negative influence of management compensation to tax avoidance.*

**Keywords:** *Tax avoidance, Management compensation, Family ownership*

## **1. Pendahuluan**

Secara umum dapat dikatakan bahwa penghindaran pajak merupakan segala jenis aktivitas dan transaksi yang dapat berdampak terhadap penurunan kewajiban pajak perusahaan (Hanlon dan Heitzmen, 2010). Penghindaran pajak sebenarnya cukup banyak terjadi di Indonesia, misalnya kasus penggelapan pajak terbesar yang dilakukan oleh PT Asian Agri Tbk yang terbukti oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) merugikan negara triliunan rupiah sehingga dikenakan sanksi berupa denda yang sangat besar (Dharmasaputra, 2013).

Selain itu, terdapat pula kasus penghindaran pajak yang dilakukan oleh PT Bumi Resources Tbk yang merupakan salah satu perusahaan keluarga di Indonesia. Bahkan, diduga penghindaran pajak PT Bumi Resources dan anak usahanya yaitu PT Kaltim Prima Coal (KPC) dan PT Arutmin Indonesia mencapai 2,1 triliun, atas kasus tersebut DJP telah menetapkan direktur keuangan PT Bumi Resources dan direktur PT Kaltim Prima Coal sebagai tersangka pidana penggelapan pajak (Tempo, diakses 22 Maret 2010).

Meskipun dengan besarnya risiko terkena sanksi hukum tersebut bukan berarti menurunkan minat perusahaan untuk tetap melakukan penghindaran pajak karena tidak dapat dipungkiri bahwa besarnya

manfaat penghematan pajak cukup menggiurkan bagi perusahaan. Selain itu lemahnya aturan perpajakan di Indonesia, semakin membuka peluang bagi perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak melalui celah aturan perpajakan yang berlaku (Suandy, 2003).

Penghindaran pajak merupakan masalah serius karena hingga saat ini masih terdapat kasus-kasus penggelapan pajak yang cukup menarik untuk diteliti. Penelitian sebelumnya lebih banyak hanya melihat keterkaitan antara penghindaran pajak dengan kompensasi manajemen, seperti Phillips (2003), Minnick dan Noga (2010), Robinson *et al.* (2010) dan Armstrong *et al.* (2012) yang menghubungkan antara kompensasi manajemen dengan penghindaran pajak dan hasilnya juga masih belum konsisten. Selain itu, penelitian sebelumnya belum ada yang mempertimbangkan peran kepemilikan keluarga sebagai faktor lainnya yang dapat mempengaruhi keputusan perusahaan melakukan penghindaran pajak.

Claessens *et al.* (2000) menyatakan bahwa pada negara-negara di kawasan Asia Timur termasuk Indonesia, sebagian besar perusahaan memiliki struktur kepemilikan yang terkonsentrasi dan dimiliki oleh keluarga. Penelitian tersebut memberikan bukti bahwa masih adanya praktik kapitalisme kroni yang terjadi di Indonesia, seperti Salim Group, Raja Garuda (Tanoto Sukanto/Asian Agri Group), dan perusahaan-perusahaan yang dimiliki oleh keluarga Cendana (Soeharto). Hal ini tentunya akan memberikan dampak perbedaan perilaku perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak.

Wang (2006) menemukan bahwa perusahaan kepemilikan keluarga memiliki kualitas pelaporan keuangan yang lebih dapat dipercaya dibandingkan apabila tidak dimiliki oleh keluarga. Namun, beberapa kasus yang terjadi di Indonesia justru menunjukkan sebaliknya bahwa perusahaan keluarga lebih banyak melakukan penghindaran pajak sehingga dapat dikatakan bahwa laporan keuangannya lebih tidak dapat dipercaya dibandingkan perusahaan yang tidak dimiliki oleh keluarga. Hal ini menunjukkan bahwa temuan Wang (2006) tidak konsisten dengan fakta yang terjadi saat ini khususnya dalam konteks perusahaan di Indonesia.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Armstrong *et al.* (2012) dengan menambahkan peran moderasi kepemilikan keluarga sebagai variabel kontribusi untuk mengisi *gap* penelitian sebelumnya. Selain itu, kontribusi berikutnya yaitu penggunaan pengukuran variabel kepemilikan keluarga menggunakan *dummy* mengikuti pendekatan Wang (2006) yang masih jarang digunakan di

Indonesia dan penghindaran pajak menggunakan proksi *book tax differences (BTD)* mengacu Tang dan Firth (2008).

## **2. Landasan Teori dan Pengembangan Hipotesis**

Dalam perkembangannya masih terdapat pro dan kontra mengenai dampak dari aktivitas penghindaran pajak. Ada yang beranggapan bahwa penghindaran pajak dapat memberikan manfaat melalui penghematan pajak perusahaan (Mills, 1998), mengurangi risiko *default* bank, dan menurunkan biaya pinjaman (Graham dan Tucker, 2006). Namun, pendapat lain menyatakan bahwa dampaknya justru dapat menimbulkan risiko terhadap perusahaan (Balakrishnan *et al.*, 2012), meningkatkan *agency risk* (Desai dan Dharmapala, 2006), dan risiko pemeriksaan pajak (Mills 1998).

Hasan *et al.* (2013) menunjukkan bahwa terdapat 2 perspektif *stakeholder* dalam menyikapi penghindaran pajak. Pertama, pemberi pinjaman (*debt holder*) akan merespon negatif penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan karena berisiko terhadap masa depan perusahaan dan kemungkinan *default (increasing risk exposure)*. Kedua, perspektif pemegang saham (*shareholder*) justru sebaliknya merespon positif karena dapat meningkatkan laba perusahaan yang pada akhirnya akan memberikan keuntungan kepada pemegang saham (*increasing benefit*).

### *2.1 Pengaruh Kompensasi Manajemen terhadap Penghindaran Pajak*

Penghindaran pajak dapat menimbulkan benturan kepentingan antara dua pihak yang lebih dikenal dengan istilah masalah keagenan (Masri dan Martani, 2012). Manajemen sebagai *agent* tentu menginginkan bonus atas kinerjanya yang sebagian besar diukur dari laba sehingga manajemen cenderung lebih oportunistik untuk melakukan penghindaran pajak, sedangkan pemilik ingin masa depan perusahaan tetap terjamin keberlanjutannya dan investasi mereka tetap aman sehingga pemilik perusahaan memberikan sejumlah kompensasi kepada manajemen agar mengurangi oportunistik manajemen dalam melakukan penghindaran pajak.

Ozkan (2011) dan Croci *et al.* (2012) menyatakan bahwa pemberian kompensasi yang optimal kepada manajemen (CEO) dapat menurunkan masalah keagenan dalam perusahaan sehingga dapat dijadikan solusi untuk menurunkan perilaku oportunistik manajemen dalam melakukan penghindaran

pajak yang dapat membahayakan masa depan perusahaan. Morck dan Yeung (2003) menyatakan bahwa dari perspektif teori keagenan, CEO memiliki kecenderungan untuk mengambil keputusan yang merugikan perusahaan. Oleh karena itu, tingkat kompensasi direksi yang optimal dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas kinerja dan keselarasan antara pemilik dan manajemen yang menjalankan perusahaan (Chalmer *et al.*, 2006).

Robinson *et al.* (2010) dan Armstrong *et al.* (2012) membuktikan terdapat pengaruh negatif antara kompensasi manajemen dengan penghindaran pajak. Ketika suatu perusahaan melakukan penghindaran pajak yang agresif, maka akan menimbulkan ketidakpastian yaitu apakah tindakan pajak tersebut berisiko atau tidak terhadap pelanggaran hukum bagi perusahaan (Murphy, 2004). Oleh karena itu, dapat diduga bahwa pemilik menganggap penghindaran pajak sangat berisiko bagi masa depan perusahaan sehingga pemilik akan memberikan sejumlah kompensasi kepada manajemen agar mereka tidak bersikap oportunistik dalam melakukan penghindaran pajak.

**H<sub>1</sub> :** *Kompensasi Manajemen berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak perusahaan*

## *2.2 Peran Kepemilikan Keluarga terhadap Pengaruh Kompensasi dan Penghindaran Pajak*

Selain itu, khususnya di Indonesia yang sebagian besar merupakan perusahaan kepemilikan keluarga. Dampak pemberian kompensasi tentu akan berbeda karena perusahaan keluarga memiliki keunikan tersendiri. Arifin (2003) membuktikan bahwa perusahaan kepemilikan keluarga di Indonesia masalah keagenannya lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan yang kepemilikannya tersebar atau tanpa pengendali utama.

Chen *et al.* (2010) menyatakan bahwa umumnya manajemen kunci perusahaan keluarga justru dikendalikan oleh anggota keluarga dari perusahaan itu sendiri. Kepentingan perusahaan lebih terpusat pada kepentingan pemilik, karena pada dasarnya keuntungan dan risiko perusahaan sebagian besar akan lebih dirasakan oleh pemilik. Menurut Anderson dan Reeb (2003), pemilik perusahaan keluarga memiliki pengaruh yang kuat dalam perusahaan dan lebih cenderung memperhatikan masa depan perusahaan dalam jangka panjang karena pemilik lebih fokus untuk mewariskan kepada keturunannya.

Wang (2006) menyatakan bahwa pada umumnya perusahaan keluarga, akan menempatkan anggota keluarganya dalam jabatan strategis perusahaan agar dapat mengendalikan perusahaan dengan baik.

Penelitian ini memberikan pemahaman baru melalui definisi kepemilikan keluarga yang digambarkan dengan adanya perwakilan keluarga pendiri dalam jajaran dewan direksi atau menempatkan perwakilan tersebut sebagai direktur utama (CEO) perusahaan.

Perusahaan keluarga memiliki sistem pengawasan yang lebih baik dan memilih untuk tidak melakukan penghindaran pajak dibandingkan dengan perusahaan yang kepemilikannya tersebar. Alasannya karena perusahaan keluarga cenderung memilih untuk mempertahankan reputasi dan menghindari risiko hukum atas pelanggaran pajak (Baderther *et al.*, 2013). Sehingga kaitannya dengan pemberian kompensasi kepada manajemen pada perusahaan keluarga diharapkan juga dapat mengurangi perilaku oportunistik penghindaran pajak yang dapat mengancam reputasi perusahaan (Robinson *et al.*, 2010; Armstrong *et al.*, 2012).

Berdasarkan tinjauan literatur di atas maka dapat diduga bahwa apabila perusahaan merupakan kepemilikan keluarga yang terindikasi dari adanya perwakilan dari keluarga pendiri sebagai direktur utama (CEO) perusahaan, maka dapat memperkuat pengaruh negatif kompensasi manajemen terhadap penghindaran pajak perusahaan.

***H<sub>2</sub>*** : *Apabila terdapat perwakilan dari keluarga pendiri sebagai direktur utama (CEO) perusahaan, maka dapat memperkuat pengaruh negatif kompensasi manajemen terhadap penghindaran pajak perusahaan*

.

### **3. Metode Penelitian**

#### *3.1 Populasi dan Sampel*

Populasi penelitian terdiri dari perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2011-2014. Alasan menggunakan sampel perusahaan manufaktur karena merupakan jenis industri paling dominan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI), sehingga diharapkan akan bervariasi pula perilaku penghindaran pajaknya.

Tabel 1 menunjukkan jumlah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia hingga Maret 2014 sebanyak 560 sampel observasi. Pengambilan data selama 4 tahun didasarkan pada kebutuhan analisis regresi dan untuk melihat perubahan antar waktu dan antar individu sampel.

Berdasarkan hasil seleksi sampel dengan metode *purposive sampling* diperoleh sebanyak 268 sampel observasi.

Tabel 1.  
Sampel Penelitian

	Tahun – Perusahaan	Jumlah Perusahaan
Jumlah perusahaan manufaktur di BEI per Maret 2014	560	140
Dikurangi:		
-Tidak menggunakan mata uang rupiah	(32)	(8)
-Tidak menggunakan tahun fiskal yang berakhir pada 31 desember	(56)	(14)
-Data tidak lengkap dari tahun 2011-2014	(204)	(51)
<b>Total Observasi</b>	<b>268</b>	<b>67</b>

### 3.2 Model Penelitian

Untuk menguji hipotesis H<sub>1</sub> mengenai pengaruh kompensasi manajemen terhadap penghindaran pajak perusahaan, kemudian untuk menguji hipotesis H<sub>2</sub> mengenai peran kepemilikan keluarga terhadap pengaruh antara kompensasi manajemen dan penghindaran pajak perusahaan, dapat digambarkan dalam persamaan model sebagai berikut:

$$BTDS_{it} = \beta_0 + \beta_1 KMGT_{it} + \beta_2 KMGT_{it} * DFAMILY_{it} + \beta_3 SIZE_{it} + \beta_4 ROA_{it} + \beta_5 LEV_{it} + \beta_6 GROWTH_{it} + \beta_7 CINT_{it} + \beta_8 INVINT_{it} + \epsilon_{it}$$

Keterangan:

$BTDS_{it}$  = Penghindaran pajak perusahaan  $i$  pada tahun  $t$  yang diukur dengan *book tax differences* ( $BTDS_{it}$ )

$KMGT_{it}$  = Logaritma natural kompensasi manajemen perusahaan  $i$  pada tahun  $t$

$DFAMILY_{it}$  = 1 jika direktur utama (CEO) pada perusahaan  $i$  merupakan pemilik atau kerabat dari keluarga pendiri perusahaan (terafiliasi) yang kepemilikannya >5%, dan 0 selain itu

$SIZE_{it}$  = Logaritma natural total asset perusahaan  $i$  pada tahun  $t$

$ROA_{it}$  = perbandingan laba bersih dan total asset perusahaan  $i$  pada tahun  $t$

$LEV_{it}$  = Perbandingan antara total liabilitas dengan total ekuitas perusahaan  $i$  pada tahun  $t$

$GROWTH_{it}$  = Pertumbuhan perusahaan yang diukur dari *market to book ratio* perusahaan  $i$  pada tahun  $t$

$CINT_{it}$  = Perbandingan total asset tetap dan total asset perusahaan  $i$  pada tahun  $t$

$INVINT_{it}$  = Perbandingan total persediaan dan total asset perusahaan  $i$  pada tahun  $t$

Penelitian ini menggunakan jenis data panel dengan metode regresi *Estimated Generalized Least Square (EGLS)* untuk mengatasi kemungkinan masalah asumsi klasik pada model. Adapun maksud penggunaan data panel yaitu untuk melihat perbedaan karakteristik individu dan waktu pengamatan terhadap variabel yang diamati.

### 3.3 Operasionalisasi Variabel

#### Variabel Dependen

Penghindaran pajak merupakan proses merekayasa usaha dan transaksi wajib pajak agar utang pajak berada pada jumlah yang minimal tetapi masih dalam bingkai peraturan perpajakan (Suandy, 2003). Penelitian sebelumnya yaitu Armstrong *et al.* (2012) mengukur penghindaran pajak dengan proksi GAAP ETR yang memiliki kelemahan yaitu tidak dapat menggambarkan penghindaran pajak jangka pendek perusahaan (Minnick & Noga, 2010).

Dalam penelitian ini dilakukan perbaikan terhadap penelitian sebelumnya dengan mengukur penghindaran pajak menggunakan proksi *book tax differences* (BTDs) mengikuti model Tang dan Firth (2008), merupakan perencanaan pajak yang paling populer dalam hal mengurangi pajak dan memaksimalkan *time value of money*.

Rumus yang digunakan adalah:

$$BTDs = \frac{Book\ Income - Taxable\ Income}{Total\ Asset}$$

Keterangan:

$BTDs$  = Perbedaan laba fiskal dan komersial

$Book\ Income$  = Laba Sebelum Pajak Perusahaan (EBIT)

$Taxable\ Income$  = Perbandingan antara beban pajak dengan tarif pajak yang berlaku.

$Total\ Asset$  = Jumlah asset perusahaan per tahun

## Variabel Independen

- **Kompensasi Manajemen**

Dalam mengurangi masalah yang muncul akibat konflik kepentingan antara pemilik perusahaan dengan manajemen (*agency theory*), pemilik pada umumnya mengeluarkan biaya berupa kompensasi yang diberikan kepada manajemen agar lebih transparan dan meningkatkan kualitas kinerjanya (McColgan, 2001).

Proksi yang digunakan untuk mengukur kompensasi manajemen ini mengikuti pendekatan yang dilakukan oleh Armstrong *et al.* (2012). Data logaritma natural nilai total kompensasi manajemen yang diterima selama setahun yaitu penjumlahan kompensasi yang diterima oleh Dewan Direksi dan Dewan Komisaris, terdapat dalam pengungkapan Catatan Atas Laporan Keuangan.

- **Kepemilikan Keluarga**

Dalam perkembangannya cukup beragam ukuran dan asumsi yang digunakan penelitian sebelumnya dalam menentukan apakah suatu perusahaan dapat dikatakan kepemilikan keluarga yaitu ada yang menggunakan *dummy* maupun persentase, terlepas bahwa setiap ukuran memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing.

Arifin (2003) mengukur kepemilikan keluarga berdasarkan persentase kepemilikan. Penelitian ini mendefinisikan bahwa yang dimaksud dengan perusahaan keluarga adalah perusahaan yang tercatat (kepemilikan >5%) dan bukan merupakan perusahaan publik, milik negara, dan institusi. Anderson dan Reeb (2003) mengukur kepemilikan keluarga dengan beberapa cara. Salah satunya dengan menggunakan variabel *binary (dummy)* yaitu 1 jika anggota keluarga pendiri perusahaan merupakan dewan (*board of directors*) atau manajemen puncak (*top management*) dalam perusahaan, tanpa mempertimbangkan tingkat kepemilikan sahamnya, dan 0 selain itu.

Wang (2006) memperbaiki ukuran variabel *binary* yang sebelumnya digunakan oleh Anderson dan Reeb (2003) dengan mempertimbangkan tingkat kepemilikan saham pemilik, sehingga pada penelitian ini untuk mengukur kepemilikan keluarga mengacu kepada Wang (2006) yaitu 1 jika direktur utama (CEO) pada perusahaan merupakan pemilik atau kerabat dari keluarga pendiri perusahaan (terafiliasi)

yang kepemilikan sahamnya > 5%, dan 0 selain itu. Data yang berkaitan dengan pengukuran kepemilikan keluarga dapat ditemukan dalam laporan tahunan perusahaan yang diolah secara *hand collected*.

- **Variabel Kontrol**

Variabel kontrol yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan karakteristik perusahaan yang dilihat berdasarkan Ukuran perusahaan (*SIZE*), *leverage (LEV)*, *return on asset (ROA)*, pertumbuhan perusahaan (*GROWTH*), Intensitas modal (*CINT*) dan intensitas persediaan (*INVINT*). Stickney dan McGee (1982) dalam Phillips (2003) menemukan bahwa intensitas modal dan intensitas persediaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak melalui percepatan biaya asset berdasarkan umur ekonomis asset tetap. Data yang digunakan untuk menghitung berbagai variabel kontrol di atas terdapat pada Laporan Keuangan perusahaan per 31 desember.

## **4. Hasil Penelitian**

### *4.1 Deskriptif Statistik*

Berdasarkan tabel 2 menunjukkan rata-rata *book tax differences (BTDS)* sebesar 0,05 dengan standar deviasi 0,06 artinya bahwa rata-rata perusahaan di Indonesia cenderung melakukan penghindaran pajak yang bersifat *income increasing*. Besaran kompensasi manajemen (*KMGT*) yang diterima direksi selama setahun rata-rata sebesar 0,17 miliar dengan nilai maksimum sebesar 3,31 miliar setahun, hal ini menunjukkan bahwa nilai paket kompensasi yang diberikan perusahaan relatif besar dan cukup bervariasi.

Sedangkan rata-rata kepemilikan keluarga (*DFAMILY*) sebesar 64% dari total keseluruhan sampel observasi dengan standar deviasi 0,48. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar perusahaan manufaktur yang terdapat di Indonesia merupakan perusahaan dengan kepemilikan keluarga. Adapun rata-rata ukuran perusahaan (*SIZE*) sebesar 21,74 triliun dengan nilai minimum sebesar 17,49 triliun dan nilai maksimum sebesar 25,16 triliun dengan standar deviasi 1,46 menunjukkan bahwa ukuran perusahaan besarnya cukup bervariasi.

Tabel 2.

## Statistik Deskriptif

<b>Statistik Deskriptif</b>						
	<b>N</b>	<b>Mean</b>	<b>Median</b>	<b>Maksimum</b>	<b>Minimum</b>	<b>Std.Dev</b>
<i>BTDS</i>	268	0,05	0,03	0,49	0,00	0,06
<i>KMGT</i>	268	0,17	0,06	3,31	0,01	0,42
<i>DFAMILY</i>	268	0,64	1,00	1,00	0,00	0,48
<b>Variabel Kontrol</b>						
<i>SIZE</i>	268	21,74	21,67	25,16	17,49	1,46
<i>ROA</i>	268	0,08	0,09	0,60	-0,41	0,10
<i>LEV</i>	268	0,56	0,53	3,24	0,04	0,32
<i>GROWTH</i>	268	0,00	0,00	0,16	-0,74	0,05
<i>CINT</i>	268	0,47	0,46	0,96	0,01	0,25
<i>INVINT</i>	268	0,16	0,13	0,66	0,00	0,15

Keterangan Variabel:  
*BTDS<sub>it</sub>* = Penghindaran pajak perusahaan *i* pada tahun *t* yang diukur dengan *book tax differences*, *KMGT<sub>it</sub>*= Logaritma natural kompensasi manajemen perusahaan *i* pada tahun *t*, *DFAMILY<sub>it</sub>*= 1 jika direktur utama (CEO) perusahaan *i* pada tahun *t* merupakan pemilik atau kerabat dari keluarga pendiri perusahaan (terafiliasi) yang kepemilikannya >5%; dan 0 selain itu, *SIZE<sub>it</sub>*= Logaritma natural total asset perusahaan *i* pada tahun *t*, *ROA<sub>it</sub>*= Perbandingan laba bersih dan total asset perusahaan *i* pada tahun *t*, *Growth<sub>it</sub>*= Pertumbuhan perusahaan yang diukur dari *market to book ratio* perusahaan *i* pada tahun *t*, *INVINT<sub>it</sub>*= Perbandingan total persediaan dan total asset perusahaan *i* pada tahun *t*, *CINT<sub>it</sub>*= Perbandingan total asset tetap dan total asset perusahaan *i* pada tahun *t*, dan *LEV<sub>it</sub>*= Perbandingan antara total liabilitas dengan total ekuitas perusahaan *i* pada tahun *t*,

*Return on asset (ROA)* perusahaan sampel rata-rata sebesar 0,08 artinya tingkat profitabilitas perusahaan rata-rata positif, hal ini menunjukkan kinerja perusahaan sampel tergolong cukup baik. Kemudian rasio hutang perusahaan (*LEV*) sampel rata-rata sebesar 0,56 yang menunjukkan bahwa proporsi hutang yang cukup berimbang dengan struktur modalnya, dan pertumbuhan perusahaan (*GROWTH*) rata-rata sebesar 0,00 yang menunjukkan rata-rata perusahaan sampel hampir tidak mengalami pertumbuhan. Terakhir, rata-rata intensitas persediaan (*INVINT*) dan intensitas modal (*CINT*) masing-masing sebesar 47% dan 16% dari asset yang dimiliki oleh perusahaan.

#### 4.2 Hasil dan Diskusi

Tabel 3 menunjukkan bahwa hipotesis 1 diterima, variabel kompensasi manajemen (*KMGT*) signifikan pada tingkat signifikansi 1% dengan koefisien negatif sebesar -0,03. Hasil ini konsisten dengan Armstrong *et al.* (2012) dan Robinson *et al.* (2010) bahwa kompensasi manajemen berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak perusahaan. Hal ini berarti bahwa terbukti bahwa semakin tinggi

kompensasi yang diberikan kepada manajemen akan semakin menurunkan penghindaran pajak perusahaan.

Bukti di atas menunjukkan bahwa perusahaan di Indonesia cenderung khawatir terhadap risiko hukum yang timbul apabila melakukan penghindaran pajak yang agresif sehingga perusahaan menggunakan mekanisme kompensasi untuk membatasi keputusan oportunistik manajemen dalam melakukan penghindaran pajak sehingga diharapkan perusahaan dapat terhindar dari risiko yang mungkin timbul pada masa yang akan datang apabila perusahaan melakukan penghindaran pajak.

Bagaimanapun, pada dasarnya perusahaan tidak hanya sekedar bertanggungjawab terhadap pemilikinya, melainkan perlu juga bertanggungjawab terhadap *stakeholder* yang memiliki kepentingan atas aktivitas perusahaan. Oleh karena itu, semua perusahaan yang beroperasi di Indonesia tentu harus memenuhi kewajibannya terhadap negara dengan taat membayar pajak dan kemudian mematuhi segala aturan yang berlaku.

Dalam UU KUP pasal 17A dan 17B yang diatur di Indonesia menyatakan bahwa Direktorat Jenderal Pajak (DJP) wajib melakukan pemeriksaan atas pajak Nihil dan pajak lebih bayar perusahaan (kompensasi pajak). Pemeriksaan yang dilakukan oleh petugas pajak sering dianggap sebagai risiko bagi perusahaan karena proses pemeriksaan tentunya akan menyita banyak waktu, biaya, tenaga serta belum lagi adanya kemungkinan perusahaan akan terkena masalah hukum apabila fiskus pajak menemukan bukti-bukti baru yang justru akan semakin merugikan perusahaan. Sehingga banyak perusahaan tetap akan membayar pajak meskipun sedang mengalami kerugian untuk menghindari proses pemeriksaan.

Selain itu, pada hipotesis 2 sebelumnya diduga bahwa apabila terdapat perwakilan dari keluarga pendiri sebagai direktur utama (CEO) perusahaan, maka dapat memperkuat pengaruh negatif kompensasi manajemen terhadap penghindaran pajak perusahaan. Hasil regresi pada tabel 3 menunjukkan bahwa variabel kepemilikan keluarga (*DFAMILY*) signifikan pada tingkat 1%, namun arah koefisiennya positif sebesar 0,02 artinya apabila perusahaan merupakan kepemilikan keluarga justru dapat memperlemah pengaruh negatif kompensasi manajemen terhadap penghindaran pajak sehingga hipotesis 2 ditolak.

Tabel 3.  
Uji Hipotesis H<sub>1</sub> dan H<sub>2</sub>

<i>Variabel Bebas</i>	Prediksi Arah	<i>Variabel Terikat</i> <i>BTDs</i>
<i>Intercept</i>		0,17*** (8,20)
<i>KMGT</i>	-	-0,03*** (-2,99)
<i>KMGT*DFAMILY</i>	-	0,02*** (2,66)
Variabel Kontrol		
<i>SIZE</i>	-	-0,01*** (-7,44)
<i>ROA</i>	+	0,04* (1,91)
<i>LEV</i>	+	0,05*** (8,08)
<i>GROWTH</i>	-	-0,01 (-0,82)
<i>CINT</i>	+	-0,01 (-1,12)
<i>INVINT</i>	-	-0,05*** (-5,21)
R-squared		0,39
Adjusted R-squared		0,37
F-Statistic		20,43
Prob (F-Stat)		0.00
Durbin-Watson Stat		1,21
# Observasi		268
# Emiten Manufaktur		67

Observasi dalam penelitian ini berjumlah 268 yang terdiri dari 67 emiten manufaktur dari tahun 2011 hingga 2014. Data yang digunakan berasal dari laporan keuangan entitas.  $BTDs_{it}$  = Penghindaran pajak perusahaan  $i$  pada tahun  $t$  yang diukur dengan *book tax differences*,  $KMGT_{it}$  = Logaritma natural kompensasi manajemen perusahaan  $i$  pada tahun  $t$ ,  $DFAMILY_{it} = 1$  Jika direktur utama perusahaan  $i$  pada tahun  $t$  merupakan pemilik atau kerabat dari keluarga pendiri perusahaan (terafiliasi) yang kepemilikannya >5%; dan 0 selain itu,  $SIZE_{it}$  = Logaritma natural total asset perusahaan  $i$  pada tahun  $t$ ,  $ROA_{it}$  = Perbandingan laba bersih dan total asset perusahaan  $i$  pada tahun  $t$ ,  $Growth_{it}$  = Pertumbuhan perusahaan yang diukur dari *market to book ratio* perusahaan  $i$  pada tahun  $t$ ,  $INVINT_{it}$  = Perbandingan total persediaan dan total asset perusahaan  $i$  pada tahun  $t$ ,  $CINT_{it}$  = Perbandingan total asset tetap dan total asset perusahaan  $i$  pada tahun  $t$ , dan  $LEV_{it}$  = Perbandingan antara total liabilitas dengan total ekuitas perusahaan  $i$  pada tahun  $t$ , Tanda \*\*\*, \*\*, dan \* mengindikasikan signifikansi level 0.01, 0.05, dan 0.10 (*one-tailed*).

Hasil ini berlawanan dengan Baderther *et al.*, 2013 dan Chen *et al.* (2010) yang menyatakan bahwa perusahaan keluarga cenderung tidak melakukan penghindaran pajak. Namun, sebaliknya bukti ini

menunjukkan bahwa perusahaan keluarga justru lebih oportunis melakukan penghindaran pajak dibandingkan dengan perusahaan umum (Mills dan Newberry, 2001; Hanlon *et al.*, 2005).

Fan dan Wong (2002) menyatakan bahwa dalam kondisi aturan hukum yang lemah seperti yang terjadi pada negara-negara di kawasan Asia Timur, perusahaan keluarga lebih cenderung memiliki kualitas laba yang buruk dan tidak transparan dalam pengungkapan laporan keuangannya. Sehingga dapat dikatakan bahwa perusahaan keluarga di kawasan negara Asia Timur cenderung lebih oportunis untuk melakukan penghindaran pajak.

Dalam kasus penghindaran pajak di Indonesia, terbukti bahwa kasus penghindaran pajak dilakukan oleh perusahaan keluarga seperti kasus Asian Agri Grup dan Bumi Resources. Asian Agri Grup merupakan perusahaan yang dimiliki oleh keluarga Tanoto Sukanto, sedangkan Bumi Resources merupakan perusahaan milik keluarga Bakrie. Kedua perusahaan tersebut terbukti melakukan penghindaran pajak yang sangat berpotensi merugikan negara yaitu masing-masing sebesar 1,295 triliun dan 376 miliar (Dharmasaputra, 2013).

Dapat dikatakan bahwa lemahnya aturan perpajakan di Indonesia membuka peluang perusahaan keluarga untuk memanfaatkan celah dari aturan pajak, disamping itu biaya untuk melakukan penghindaran pajak dapat dikatakan cukup rendah dibandingkan keuntungan yang mungkin dihasilkan dari aktivitas penghindaran pajak karena kurangnya pengawasan terhadap perusahaan, tidak tegasnya sanksi hukum untuk perusahaan yang melakukan penghindaran pajak serta rendahnya kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak.

Oleh karena itu, kedepannya penting bagi regulator untuk terus memperbaiki aturan pajak sehingga tidak mengandung banyak celah, memberikan sanksi yang tegas kepada perusahaan yang terbukti melakukan penghindaran pajak, serta memberikan pendidikan dan sosialisasi dalam membangkitkan kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak sehingga dapat menyelamatkan Negara dari potensi kerugian akibat dari penghindaran pajak.

## **5 Simpulan, Implikasi, dan Keterbatasan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti empiris pengaruh dari kompensasi manajemen terhadap penghindaran pajak perusahaan, kemudian juga menggambarkan bagaimana peran moderasi

kepemilikan keluarga terhadap hubungan antara kompensasi manajemen dengan penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Berdasarkan hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa kompensasi manajemen berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak perusahaan. Hal ini mengindikasikan bahwa mekanisme pemberian kompensasi dapat digunakan oleh pemilik (*principle*) untuk menurunkan penghindaran pajak yang dilakukan oleh manajemen perusahaan (*agent*). Semakin besar kompensasi yang diberikan kepada manajemen, maka semakin rendah tingkat penghindaran pajak yang dapat mengancam masa depan perusahaan.

Selain itu, penelitian ini membuktikan bahwa apabila perusahaan merupakan kepemilikan keluarga yang digambarkan dengan adanya perwakilan keluarga pendiri dalam manajemen kunci perusahaan akan semakin memperlemah pengaruh negatif antara kompensasi manajemen dan penghindaran pajak perusahaan. Hal ini dapat terjadi karena perusahaan keluarga di Indonesia cenderung memiliki kualitas laba yang buruk dan tidak transparan, sehingga dapat menjadi perhatian bagi fiskus untuk lebih mengawasi perusahaan khususnya perusahaan keluarga karena lebih cenderung untuk melakukan penghindaran pajak.

Dalam penelitian ini terdapat beberapa keterbatasan. Pertama, penelitian ini hanya mengukur nilai kompensasi dari logaritma natural nominal kompensasi yang diberikan kepada manajemen tanpa mempertimbangkan berapa ukuran dewan dalam perusahaan yang juga dapat mempengaruhi besaran kompensasi yang dikeluarkan oleh perusahaan. Kedua, ukuran kepemilikan keluarga menggunakan variabel *dummy*, yaitu perusahaan diasumsikan kepemilikan keluarga jika direktur utama (CEO) merupakan pemilik atau kerabat dari pendiri perusahaan, beberapa perusahaan ada yang tidak begitu jelas informasi kepemilikannya, akibatnya bisa saja perusahaan tidak teridentifikasi karena keterbatasan informasi tersebut.

## **Referensi**

- Anderson, R., & Reeb, D. (2003). Founding Family Ownership and Family Firm Performance: Evidence from The S&P 500. *Journal of Finance* 58, 1301-1328.
- Arifin, Z. (2003). *Masalah Agensi dan Mekanisme Kontrol pada Perusahaan dengan Struktur kepemilikan Terkonsentrasi yang Dikontrol Keluarga: Bukti dari Perusahaan Publik DiIndonesia*. Universitas Indonesia.

- Armstrong, C.S., Blouin, J.L., & Larcker, D.F. (2012). The Incentives for Tax Planning. *Journal of Accounting and Economics* 53, 391-411.
- Badertscher, B.A., Phillips, J.D., & Rego, S.O. (2009). Earnings Management Strategies and The Trade Off Between Tax Benefits and Detection Risk: To Conform or Not to Conform. *The Accounting Review* 84, 63-97.
- Balakhrisnan, K., Blouin, J., & Guay, W. (2012). Does Tax Aggressiveness Reduce Financial Reporting Transparency? Unpublished *Working Paper*. University of Pennsylvania, Philadelphia, PA.
- Chalmers, K., Phing-Sheng Koh., & Geof Stapledon. (2006). The Determinant of CEO Compensation: Rent Extraction or Labor Demand. *The British Accounting Review*, 1-17.
- Chen, S., Chen, X., Cheng, Q., & Shelvin, T. (2010). Are Family Firms More Tax Aggressive than Non-Family Firms?. *Journal of Financial Economics* 95, 41-61.
- Claessens, S., Djankov, S., & Lang, L.H.P. (2000). The Separation of Ownership and Control in East Asian Corporations. *Journal of Financial Economics* 81, 81-112.
- Croci, E., Gonenc, H., & Ozkan, N. (2012). CEO Compensation, Family Control and Institutional Investor in Continental Europe. *Journal of Banking and Finance* 36, 3318-3335.
- Desai, M., & Dharmapala, D. (2006). Corporate Tax Avoidance and High-Powered Incentives. *Journal of Financial Economics* 79, 145-179.
- Dharmasaputra, M. (2013). *Saksi Kunci Investigasi Skandal Pajak Terbesar di Indonesia*. Tempo.
- Fan, J., & T.J. Wong. (2002). Corporate Ownership Structure and the Informativeness of Accounting Earnings in East Asia. *Journal of Accounting and Economics* 33, 401-425.
- Hanlon, M., & Heitzman, S. (2010). A Review of Tax Research. *Journal of Accounting and Economics* 50, 127-178.
- Hasan, I., Hoi, C.K., Wu, Q., & Zhang, H. (2013). Beauty is In The Eye of The Beholder: The Effect of Corporate Tax Avoidance On The Cost of Bank Loans. *Journal of Financial Economics*. 109-130.
- Masri, I., & Martani, D. (2012). *Pengaruh Tax Avoidance Terhadap Cost of Debt*. Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia: Depok.
- McColgan, P. (2001). Agency Theory and Corporate Governance: A Review of The Literature From A UK Perspective. *Departement of Accounting & Finance*. University of Strathclyde.
- Minnick, K., & Noga, T. (2010). Do Corporate Governance Characteristics Influences Tax Management. *Journal of Corporate Finance* 16, 703-718.
- Murphy, K. (2004). Aggressive Tax Planning: Differentiating Those Playing The Game from Those Who Don't. *Journal of Economic Psychology* 25, 307-329.
- Ozkan, N. (2011). CEO Compensation and Firm Performance: an Empirical Investigation of UK Panel Data. *European Financial Management* 17, 260-285.
- Phillips, J.D. (2003). Corporate Tax Planning Effectiveness: The Role of Compensation-Based Incentives. *The Accounting Review* 78, 491-521. University of Connecticut.
- Robinson, J. S., Sikes, S., & Weaver, C. 2010. The Impact of Evaluating The Tax Function As a Profit Center On Effective Tax Rates. *The Accounting Review* 85, 1035-1064.
- Suandy, E. (2003). *Perencanaan Pajak, Edisi Revisi, Salemba Empat*: Jakarta.
- Tang, T., & Firth, M. (2008). *Can book-tax differences capture earnings management and tax management? Emperical evidence from China*. University of British Columbia.
- Wang, D. (2006). Founding Family Ownership and Earnings Quality. *Journal of Accounting Research*, Vol 44, 619-656.